

**AKUNTABILITAS PUBLIK PEMERINTAH DAERAH  
DALAM BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Sumatera Utara

**TESIS**

OLEH

**JONES BENNY E. MANURUNG  
NPM. 111801044**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2013**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul : Akuntabilitas Publik Pemerintah Daerah dalam Bidang  
Perencanaan Pembangunan Studi pada Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara**

**Nama : Jones Benny E. Manurung**

**NPM : 111801044**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**



**Dr. Warjio, MA**

**Pembimbing II**



**Drs. Done Ali Usman, MAP**

**Ketua Program Studi  
Magister Administrasi Publik**



**Dr. Warjio, MA**

**Direktur**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Telah diuji pada Tanggal 17 Mei 2013**

---

---

**Nama : Jones Benny E. Manurung**

**NPM : 111801044**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua** : Drs. Kariono, MA  
**Sekretaris** : Isnaini, SH, M.Hum  
**Pembimbing I** : Dr. Warjio, MA  
**Pembimbing II** : Drs. Done Ali Usman, MAP  
**Penguji Tamu** : Drs. Usman Tarigan, MS

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Mei 2013

Yang menyatakan,



**Jones Benny E. Manurung**

## ABSTRAK

### AKUNTABILITAS PUBLIK PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN STUDI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Nama : **Jones Benny E. Manurung**  
NPM : **111801044**  
Program Studi : **Magister Administrasi Publik**  
Pembimbing I : **Dr. Warjio, MA**  
Pembimbing II : **Drs. Done Ali Usman, M.AP**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Perencanaan Pembangunan yang dilihat dari aspek : input, proses, output dan outcomes. Untuk mengetahui permasalahan dan faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Perencanaan Pembangunan, sehingga dapat diidentifikasi dan dianalisis masalah dan kendala dalam pelaksanaan fungsi Bappedda Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Dengan indikator meliputi penetapan kinerja, indikator input (masukan), indikator kinerja output (keluaran), indikator kinerja outcome (hasil), pengukuran kinerja, keberhasilan, kegagalan, pelaporan/pertanggung-jawaban. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa hasil yang dicapai pada Tahun 2012 berkenaan dengan tugas dan fungsi Bappedda Provinsi Sumatera Utara, menunjukkan bahwa sasaran strategis pada umumnya berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Dimana dari pencapaian sasaran program terdapat 5 (lima) program dengan capaian sasaran strategis lebih besar dari 90 %. Permasalahan yang dihadapi oleh Bappeddasu adalah perkembangan peraturan yang cepat berubah sehingga membawa konsekuensi penyesuaian terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

***Kata Kunci** : akuntabilitas, sasaran program, sasaran strategis.*



## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 54 Tahun 2011 disebutkan Bappeda Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi umum perencanaan pembangunan daerah, ekonomi dan keuangan, sosial budaya, tata ruang dan pengelola lingkungan, sarana dan prasarana, pengendalian, evaluasi, monitoring dan statistik. Untuk itu dalam Tesis ini penulis akan melakukan penelitian mengenai : “AKUNTABILITAS PUBLIK PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara)”.

Adapun pengerjaan tesis ini dilakukan sebagai salah satu syarat utama dalam menyelesaikan studi pada Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Medan Area, namun penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan sebuah karya tulis yang baik, hal ini mengingat keterbatasan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian serta penyusunannya.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas terselesaikannya tesis ini, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir Retna Astuti K, MS, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area;

3. Bapak Dr. Warjio, MA, selaku Ketua Program Studi MAP sekaligus Pembimbing Utama yang sangat membantu dalam memberikan bimbingan dan pengarahan dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini.
4. Drs. Done Ali Usman, M.AP sebagai Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini;
5. Bapak/Ibu Dosen serta Staf Pengajar PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu selama mengikuti perkuliahan;
6. Teman - teman satu angkatan di Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, maupun para alumni yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan semangat dalam pengerjaan tesis ini.
7. Para staf administrasi Program Pascasarjana yang telah banyak memberikan dorongan dan dukungan selama ini.

Semoga ilmu, dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Medan, Mei 2013  
Penulis

  
**JONES BENNY E. MANURUNG**

# DAFTAR ISI

Halaman

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Teori Akuntabilitas.....	11
2.1.1. Bentuk Akuntabilitas .....	19
2.1.2. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .....	21
2.1.3. Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	22
2.1.4. Metode Untuk Menegakkan Akuntabilitas.....	25
2.1.5. Tiga Dimensi Akuntabilitas.....	28
2.2 Konsep Kinerja.....	30
2.2.1. Syarat Penilaian Kinerja .....	37
2.2.2. Metode Penilaian Kinerja .....	38
2.2.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja.....	40



<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	57
3.2 Lokasi Penelitian .....	57
3.3 Sumber Data .....	58
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	59
3.5 Teknik Analisa Data .....	62
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>63</b>
4.1 Sejarah Singkat Bappeda Provinsi Sumatera Utara.....	63
4.2 Gambaran Umum Bappeda Provinsi Sumatera Utara .....	66
4.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	66
4.2.2. Struktur Organisasi .....	67
4.2.3. Uraian Tugas & Fungsi Pejabat Struktural Bappeda.....	68
4.3 Mandat yang Diberikan Kepada Bappeda Provinsi Sumatera Utara . .....	78
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>80</b>
5.1 Sumber Daya Bappeda Provinsi Sumatera Utara .....	80
5.2 Rencana Stratejik Bappeda Provinsi Sumatera Utara .....	83
5.3 Hasil Wawancara .....	89
5.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara .....	99
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>101</b>
6.1 Kesimpulan .....	101
6.2 Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Utara	
Berdasarkan Kepangkatan.....	81
Tabel 2. Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Utara	
Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	82
Tabel 3. Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Utara	
Berdasarkan Jenis Kelamin.....	83
Tabel 4. Tujuan yang ingin dicapai Bappeda Provinsi Sumatera Utara .....	88

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Utara .....	68
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Secara konseptual, Good Governance oleh UNDP dipahami sebagai implementasi otoritas politik, ekonomi, dan administratif dalam proses manajemen berbagai urusan publik pada berbagai level dalam suatu negara. Merujuk pada konsepsi tersebut, Good Governance memiliki beberapa atribut kunci seperti efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, produktif, dan sejajar serta mampu mempromosikan penegakan hukum. Di atas semua itu, atribut utama Good Governance adalah bagaimana penggunaan kekuasaan dan otoritas dalam penyelesaian berbagai persoalan publik. Dalam konteks itu, mekanisme kontrol (check and balance) perlu ditegakkan sehingga tidak ada satu komponen pun yang memegang kekuasaan absolut. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah dengan menegakkan akuntabilitas sistem, struktur, organisasi dan staf atas apa yang menjadi tanggung jawab, fungsi, tugasnya yang antara lain terlihat dari perilaku atau budaya kerjanya.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan harapan semua pihak. Upaya untuk mewujudkan good governance tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama, Inpres Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu inti pokok dari berbagai peraturan tersebut adalah bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Tujuan mengimplementasikan sistem AKIP ini adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Di kebanyakan negara berkembang, perhatian utama terhadap Good Governance dalam kaitan dengan penggunaan otoritas dan manajemen sektor publik, adalah pervasifnya korupsi yang cenderung menjadi karakter tipikal yang melekat. Bahkan di beberapa negara terbukti bahwa budaya korupsi telah begitu melekat di dalam birokrasi pemerintah yang justru ditandai oleh kelangkaan sumber daya. Dalam konteks itu, absennya akuntabilitas sangat menonjol dan menjadi satu karakter dominan budaya administrasi selama periode tertentu.

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif Kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), yang dapat dipertanyakan (answerability),

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Dessler, Gary. 2009. *Manajemen SDM buku 1*. Jakarta : Indeks
- Gibson, James L. *Organisasi dan Manajemen*, Penerbit Erlangga. Jakarta. 2000
- Gomes, Faustino Cardoso, Dr. 2003. *MSDM*. Yogyakarta : Andi
- Ibrahim, Amin, 2008. *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Jakarta: Refika Aditama.
- J.B. Ghartey, 1998, *Decentralisation Transparency Social Capital and Development*, Massachusetts.
- Kartasasmita, Pius Suratman, 2006. *Bringing The Public Back In : Revitalisasi Konsep Publik dalam Pemikiran dan Praktek Administrasi Publik di Indonesia*. Jakarta; Graha Ilmu.
- Kaloh, J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah : Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: Rineka Ilmu.
- ....., 1999, *Manajemen Proses Kebijakan*, Jakarta Lembaga Administrasi negara-Republik Indonesia
- Ledvina V. Carino, 2002, *Administrative Accountability*, San Francisco State University Fall.
- Nugroho D, Riant, 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Payaman Simanjuntak, 2005, *Evaluasi Manajemen Kinerja*, Jakarta.
- Polidano, C., "Why Bureaucrats Can't Always Do What Ministers Want: Multiple Accountabilities in Westminster Democracies." *Public Policy and Administration* 13, No. 1, Spring 1998, p 38.
- Ruky. , Ahmad. 2002. *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Sjahrudin Rasul, 2000. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja*, Jakarta.
- Soetopo, 1999, *Kebijakan Publik dan Implementasi*, Jakarta: Lembaga Administrasi negara - Republik Indonesia.
- Sugiyono, 1998. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.



- Siagian, Sondang. 2002. *Manajemen SDM*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kerja*. Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2002. *Kebijakan Publik Yang Membumi : Konsep, Strategi & Kasus*. Yogyakarta : Kerjasama YPAPI dengan Lukman Offset.
- Wicaksono, Kristian Widya, 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Jakarta: Graha Ilmu.
- World Bank, “*Strengthening Local Government in Sub-Saharan Africa*,” EDI Policy Seminar Report No. 21, Washington DC, 1989.
- World Bank, Governance and Development, Washington, D.C., 1992.

#### UNDANG-UNDANG

- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2011 *Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara*.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.